

SKRIPSI

ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA JAYA KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral *Comprehensive*
Sarjana S1 Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

DIKI IDUL PUTRA
NIM. 10875001706

PROGRAM S1

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2012

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA JAYA KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

OLEH : DIKI IDUL PUTRA

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu institusi yang berada sejajar dalam pemerintahan desa, artinya BPD dan Pemerintah Desa memiliki hubungan koordinasi. Di dalam Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD memiliki dua fungsi pokok yaitu *pertama* menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, *kedua* menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dari Peraturan Daerah tersebut BPD memiliki tugas untuk dapat menjadi mediasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Menurut pengamatan penulis, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Singingi kurang berjalan dengan baik karena terjadi kevakuman, hal ini terjadi karena (1) kurangnya pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa, (2) Kurangnya komunikasi antara sesama anggota Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat setempat. Sebagai upaya untuk memahami permasalahan ini, maka dilakukan penelitian dengan judul “*Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*”. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah : “ Mengapa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah belum optimal?”. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 9 orang. Aparat desa sebanyak 10 orang dan masyarakat sebanyak 97 orang. Untuk keperluan penelitian ini diperlukan data yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan agar data yang diinginkan akurat, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk menunjang penelitian ini. Teknik pengumpulan data di atas dilakukan dengan cara atau metode yaitu a) Observasi, b) Wawancara, c) Angket / Kuisioner. Setelah data terkumpul maka dikelompokkan menurut jenis dan sumberdaya kemudian dianalisa secara *deskriptif kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik meliputi fungsi membuat peraturan desa sebanyak 59 orang atau 50,86% dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebanyak 70 orang atau 60,34%. Berdasarkan tabel rekapitulasi, di atas dapat terlihat bahwa fungsi Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa dan Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan berbagai faktor yang meliputi, Sarana dan prasarana yang belum memadai serta Kurangnya Komunikasi dan partisipasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesabaran dan karunianya, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke alam yang lebih maju dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul : *Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*, untuk melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Srata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenan membantu dan memberikan semangat serta dorongan yang bersifat material maupun yang bersifat spritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda **Kanadis** dan Ibunda **Eli Dawati**, serta Kakek **H. Umarlius** dan Nenek **Hj. Arina** dan adik yaitu **Indra Firman, Alfido Ramadhan** yang telah mengorbankan segala tenaga dan upayanya serta do'a dan segala kasih sayangnya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Bapak **Prof. DR. H. M. Nazir Karim, MA** selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak **DR. Mahendra Romus, SP, M.Ec** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak **Drs. Almasri, M.Si** selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, dan Bapak **Rusdi. S,Sos. MA** selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara.
5. Bapak **Afrizal, S.Sos. M.Si** selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang telah banyak membantu serta memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak **Khairudin, S.Pd. MM** selaku Ketua BPD Jaya Kopah dan Bapak **Erdison** selaku Kepala Desa Jaya Kopah, serta seluruh Anggota BPD, Aparat Desa, dan Masyarakat Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan penulis yang ada di Jurusan Administrasi Negara lokal A Semester 7 (Tujuh) dan yang lainnya terutama buat, **Amrullah Sasita, S.Sos, M. Fahnurizan, S.Sos, Rengga Dwi Putra, S.Sos, Desta Rio Sadi, S.Sos, Adi Supardi, S.Sos, Andika Ramadhan, S.Sos, Ahmad Rianto, S.Sos, Doni Alamsyah, S.Sos,**

Mansur Ahmad, S.Sos, Pepi Deko, Khairi Tusqa, Dirga Pratama, Akhirudin, Rusman Arif, A. Taufik, Ari Firnanda, Afri Sandi, Yuhelmi, Jelpi Nanspa, Julni Usman, Sepri Duwan, Irwan H.S, Fery S.K, Ondri Noviko, Tarmizi, Noprion, yang telah mendukung, membantu dan memotivasi, terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan atas kerja sama dan bantuan yang sangat membangun demi penyelesaian skripsi ini, semoga suatu hari nanti tuhan mendengar dan membalas jasa kalian semua.

9. Buat kawan-kawan seangkatan dan Anggota **HMJ Administrasi Negara** dan **BEM Fekosos**, terima kasih banyak penulis ucapkan kepada kalian semua, teruslah maju dan tingkatkan prestasi.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin.

Pekanbaru, Januari 2012

Penulis,

DIKI IDUL PUTRA
Nim: 10875001706

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Otonomi Daerah.....	11
2.2 Desa	14
2.3 Pemerintahan di Tingkat Desa.....	16
2.4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	20
2.5 Masyarakat.....	23
2.6 Defenisi Operasional	25
2.7 Konsep Operasional.....	26
2.8 Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian	28

3.3 Populasi dan Sampel	28
3.4 Jenis Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Analisa Data.....	31

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografis Desa Jaya Kopah	32
4.2 Penduduk.....	33
4.3 Pemerintahan Desa.....	33
4.4 Pendidikan.....	35
4.5 Agama	36
4.6 Perekonomian	38
4.7 Budaya	38
4.8 Kesehatan	39

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden	41
5.2 Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.	44
5.3 Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	83

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	85
6.2 Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Daftar Hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.	5
Tabel 3.1 : Tabel Populasi dan Sampel Dalam Penelitian	29
Tabel 4.1 Penduduk Desa Jaya Kopah Menurut Jenis Kelamin	33
Tabel 4.2 Jumlah Aparat Pemerintah Desa Jaya Kopah	34
Tabel 4.3 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Jaya Kopah	35
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Jaya Kopah	36
Tabel 4.5 Jumlah Tempat Ibadah di Desa Jaya Kopah	37
Tabel 4.6 Mata Pencarian Penduduk Desa Jaya Kopah	38
Tabel 5.1 Jumlah Responden (BPD, Aparat Desa dan Masyarakat) Menurut Jenis Kelamin	41
Tabel 5.2 Jumlah Responden (BPD, Aparat Desa dan Masyarakat) Menurut Tingkat Umur	42
Tabel 5.3 Jumlah Responden Badan Permusyawaratan Desa, menurut tingkat pendidikan	42
Tabel 5.4 Jumlah Responden Aparat Desa Menurut Tingkat Pendidikan	43
Tabel 5.5 Jumlah Responden dari Masyarakat Menurut Tingkat Pendidikan	43
Tabel 5.6 Tanggapan Responden Mengenai Sudahkah BPD Membuat Peraturan Desa.....	45
Tabel 5.7 Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan dalam Pembuatan Peraturan Desa	47
Tabel 5.8 Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan Dalam Rapat yang dilakukan oleh BPD	48
Tabel 5.9 Tanggapan Responden Tentang Hasil Peraturan Yang Telah Ditetapkan	50

Tabel 5.10 Tanggapan Responden Mengenai Hubungan Koordinasi Antara BPD dengan Aparat Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa	52
Tabel 5.11 Tanggapan Responden Mengenai Kesesuaian Penetapan Peraturan Dengan Masalah Yang Ada	54
Tabel 5.12 Tanggapan Responden Mengenai Dampak Positif dari Penetapan Peraturan Desa Untuk Kemajuan Desa	55
Tabel 5.13 Tanggapan Responden Mengenai Keikutsertaan dalam Pembuatan Peraturan Desa	57
Tabel 5.14 Tanggapan Responden mengenai keikutsertaan dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa	58
Tabel 5.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Fungsi BPD dalam Menetapkan Peraturan Desa.....	60
Tabel 5.16 Tanggapan Responden Mengenai Pernah atau Tidaknya BPD menyalurkan Aspirasi Masyarakat	62
Tabel 5.17 Tanggapan Responden Tentang BPD yang Turun Langsung ke Lapangan Untuk Menyerap dan Menampung aspirasi Masyarakat	64
Tabel 5.18 Tanggapan Responden Tentang Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kepada Instansi Yang Berwenang	66
Tabel 5.19 Tanggapan Responden Tentang Kinerja BPD dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	67
Tabel 5.20 Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	69
Tabel 5.21 Tanggapan Responden Mengenai Proses Kinerja BPD Ketika Turun Langsung ke Lapangan Untuk Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	71
Tabel 5.22 Tanggapan Responden Tentang Tempat Menyalurkan Aspirasi dari Masyarakat	73
Tabel 5.23 Tanggapan Responden Tentang Aspirasi Yang Dijadikan Perdes Sesuai Dengan Keinginan Masyarakat.....	74
Tabel 5.24 Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi Dalam Memberikan Masukan Atau Aspirasi Kepada BPD	76

Tabel 5.25 Tanggapan Responden Mengenai Penyaluran Aspirasi Masyarakat Oleh BPD Sesuai Dengan Keinginan Masyarakat	78
Tabel 5.26 Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.	80
Tabel 5.27 Rekapitulasi Hasil Angket Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia, Undang-Undang tersebut menjadi landasan pemberian otonomi secara luas kepada daerah kabupaten maupun kota, utamanya dalam mengekspresikan potensi pembangunan yang dimiliki. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah

desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legeslatif desa.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Di dalam pasal 209 tercantum fungsi BPD, yakni menetapkan peraturan desa (perdes) bersama kepala desa (Kades), serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya revisi terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sehingga menghasilkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dimaksudkan untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah dan memiliki peluang untuk menciptakan *good governance*.

Demi menjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis, lebih baik, dan berpihak pada masyarakat, perlu adanya *check and balance* dalam pelaksanaan pemerintahan. Seluruh proses baik perumusan sampai pada pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan harus dilakukan secara transparan untuk diketahui publik sehingga mudah dalam melakukan pengawasan. BPD sangat

mempunyai peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kewenangan di tingkatan pemerintahan desa.

Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa sebagaimana juga diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Tentunya dalam melaksanakan fungsi BPD yaitu menetapkan peraturan pihak Badan Permusyawaratan Desa melakukan musyawarah dengan mengadakan rapat, hal ini sejalan dengan tuntutan Al Qur'an yang mengajarkan Bermusyawarah dalam mengambil suatu ketetapan pada proses penyelenggaraan pemerintahan. Firman Allah dalam Surah Ali Imran Ayat 159 :

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُمْ ۖ لَمَّا لَمْ يُبَيِّنْ لَكُمْ شَيْئًا ۚ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ ۚ وَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۚ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُمْ ۖ لَمَّا لَمْ يُبَيِّنْ لَكُمْ شَيْئًا ۚ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ ۚ وَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۚ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُمْ ۖ لَمَّا لَمْ يُبَيِّنْ لَكُمْ شَيْئًا ۚ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ ۚ وَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۚ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Dari Firman Allah di atas jelas menegaskan kepada umatnya bahwa dalam setiap mengambil keputusan untuk kepentingan bersama hendaknya mereka mengadakan musyawarah untuk mendapatkan mufakat.

Namun yang terjadi dilapangan menurut pengamatan penulis dan pendapat para masyarakat bahwa saat ini BPD Desa Jaya Kopah dalam menjalankan fungsinya masih memiliki kelemahan, hal ini terbukti dengan adanya berbagai kelemahan yang terjadi diantaranya:

1. Kurang berfungsinya BPD Desa Jaya Kopah dalam menjalankan tupoksinya terutama dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Karena fungsi BPD adalah untuk membuat kebijakan, anggaran dan melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat.
2. Kurang komunikasi BPD Desa Jaya Kopah dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat BPD dalam menjalankan fungsinya. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja pertemuan untuk pembahasan-pembahasan desa juga kurang yang menjadikan hal tersebut lambat dipecahkan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya keinginan aparat desa berserta masyarakat untuk menghadiri rapat yang diadakan oleh BPD itu sendiri, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1 : Daftar Hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Bulan	Undangan	Jumlah	Hadir	Tidak Hadir
1	Januari 2011	Anggota BPD	9	6	3
		Aparat Desa	10	4	6
		Masyarakat	70	30	40
2	April 2011	Anggota BPD	9	5	4
		Aparat Desa	10	6	4
		Masyarakat	70	35	35
3	Juli 2011	Anggota BPD	9	7	2
		Aparat Desa	10	5	5
		Masyarakat	70	38	32

Sumber : *Kantor BPD Desa Jaya Kopah Tahun 2011*

Dari tabel diatas dapat dilihat dan diketahui bahwa dalam tiga kali kegiatan rapat terakhir jumlah yang hadir lebih kecil daripada jumlah yang diundang, hal ini disebabkan kurangnya hubungan komunikasi antara sesama anggota BPD, Aparat Desa serta Masyarakat sehingga terjadi kevakuman dan akan menghambat pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan.

3. Dalam menetapkan Perdes, BPD Desa Jaya Kopah kurang berpartisipasi bersama kepala desa sehingga banyak peraturan-peraturan yang hanya ditetapkan oleh kepala desa tanpa berkoordinasi dengan BPD.
4. Kurangnya pengawasan yang dilakukan BPD Desa Jaya Kopah terhadap aparat desa sehingga kinerja pemerintahan desa masih rendah yang juga menghambat pencapaian program desa.
5. BPD kurang peduli dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Jaya Kopah, contohnya permasalahan perbatasan desa yang sampai saat ini masih belum jelas.

Dari gejala di atas dapat kita lihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jaya Kopah memiliki kelemahan dalam menjalankan fungsinya, seharusnya para wakil desa tersebut mampu mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat desa. Seperti permasalahan perbatasan desa yang sampai saat ini masih rancu serta berbagai masalah lainnya.

Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa:

1. Kedudukan BPD

BPD Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2. Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi:

- a. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Wewenang BPD:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun Tata Tertib BPD;

- g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya;
- h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa.

Dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 yang telah disebutkan di atas, BPD di Desa Jaya Kopah dapat menjalankan fungsinya untuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Jaya Kopah harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan , sehingga Pemerintah Desa dan BPD akan mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang.

BPD di Desa Jaya Kopah menjadi bahan pembicaraan yang menarik mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam mewujudkan demokrasi di lingkungan desa, dengan mengoptimalisasikan peran dan fungsinya. Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*”.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dimaksudkan agar tidak terjadi pencarian data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian untuk menghindari pembahasan yang luas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Kendala apa sajakah yang yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

Dengan melihat rumusan masalah seperti yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan konsep implementasi Kebijakan dan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi Pemerintahan pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambil kebijakan dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jaya Kopah dalam Upaya melaksanakan fungsi yang optimal kepada masyarakat dan diharapkan dapat memperbaiki, meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana terdiri atas enam bab dan sub bab lain, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Dalam BAB II telaah pustaka ini berisikan tentang landasan teori yang menyangkut reprensi-reprensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam BAB III metode penelitian ini berisikan tentang Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisa.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini peneliti menyajikan tentang tempat penelitian ini, peneliti mencoba menggambarkan secara umum tentang tempat penelitian di mana peneliti melakukan penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN

Dalam BAB V hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

BAB VI PENUTUP

Bab ini akan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca, Universitas.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Haw Widjaja 2002:98). Menurut Albert (2002:11) otonomi daerah adalah wewenang daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya menurut Inu Kencana (2002:94) yang berarti hak, wewenang dan kewajiban suatu pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dari penjelasan dapat dilihat bahwa otonomi daerah mengandung arti jumlah atau besarnya tugas, kewajiban, hak dan wewenang serta tanggung jawab urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah menjadi isi rumah tangga daerah. Otonomi daerah mengandung unsur kemampuan untuk mewujudkan apa yang menjadi tugas, hak dan wewenang serta tanggung jawabnya memperhatikan, mengurus, dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Otonomi daerah juga merupakan bagian dari pembagian tugas penyelenggaraan kepentingan umum antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni:

1. Undang-undang Dasar dalam pasal 18 yang menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.
2. Ketetapan MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal.

2.1.1 Pokok-Pokok Pikiran Otonomi Daerah

Isi dan jiwa yang terkandung dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya menjadi pedoman dalam penyusunan UU No. 32/2004 dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip-prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas konsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah propinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah Kabupaten dan daerah Kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan

dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

3. Pembagian daerah diluar propinsi dibagi habis ke dalam daerah otonom. Dengan demikian, wilayah administrasi yang berada dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota dapat dijadikan Daerah Otonom atau dihapus.
4. Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 th 1974 sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut UU No 32/2004 kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah Kabupaten atau daerah Kota.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berdasar pada UU No.32/2004 prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
3. Diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, sedangkan Otonomi Daerah Propinsi merupakan Otonomi Terbatas.
4. Harus sesuai dengan Konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

5. Harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6. Kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain seperti Badan Otorita, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Kehutanan, Kawasan Perkotaan Baru, Kawasan Wisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom.
7. Harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
9. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

2.2 Desa

Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup pada daerah pedesaan yang mana secara struktural dan administrasi memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan suatu negara.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 Tahun 2009 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari defenisi tersebut, sebetulnya desa merupakan bagian vital bagi keberadaan bangsa Indonesia. Vital karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh.

Menurut Budi Santosa (2003:13) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah unsur unsur desa, unsur unsur tersebut yaitu:

1. Daerah, dalam artian tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis tempat.

2. Penduduk, adalah hal yang memiliki jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
3. Tata kehidupan, dalam hal ini tata pergaulan dan ikatan-ikatan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa atau *tatal society*.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan desa menurut Haw Widjaja (2003:51) adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

2.3 Pemerintahan di Tingkat Desa

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 Tahun 2009 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjelaskan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks desa, The Liang Gie (1982:25) mendefinisikan tata pemerintahan desa adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD), termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Proses pemerintahan desa dipilih, dipantau, dan digantikan,
2. Kapasitas pemerintahan desa untuk memformulasikan dan melaksanakan kebijakan secara efektif, dan
3. Pengakuan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terhadap institusi yang mengatur interaksi antara mereka.

Unsur yang terakhir dapat dilakukan melalui tiga struktur komunikasi, yaitu kewenangan, legitimasi, dan representasi. Kewenangan adalah hak pemerintahan desa untuk membuat keputusan dalam bidang tertentu. Walaupun ini merupakan

hak dari suatu pemerintahan desa, namun yang terpenting adalah bagaimana melibatkan persepsi rakyat tentang tindakan yang perlu dilakukan pemerintahan desa. Legitimasi diperoleh karena masyarakat mengakui bahwa pemerintahan desa telah menjalankan peranannya dengan baik, atau kinerja dalam menjalankan kewenangan itu tinggi. Representasi diartikan sebagai hak untuk mewakili pengambilan keputusan bagi kepentingan golongan lain dalam kaitannya dengan alokasi sumber daya.

Dari sini terlihat bahwa tata pemerintahan desa tidaklah terbatas pada bagaimana pemerintahan desa menjalankan wewenangnya dengan baik semata, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintahan desa untuk menjalankan wewenang tersebut dengan baik (*accountabel*).

2.3.1 Perwujudan Tata Pemerintahan Desa yang Baik

Konsep tata pemerintahan tentunya tidak hanya perlu diaplikasikan di tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota, tetapi bahkan lebih penting lagi adalah di tingkat desa. Undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang (UU) nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang untuk konteks desa diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa merupakan perwujudan salah satu prasyarat yang dibutuhkan, tetapi bukan berarti bahwa regulasi ini sudah mencukupi bagi terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik.

Untuk mengaplikasikan pemberdayaan masyarakat desa yang sesungguhnya, dibutuhkan pengembangan kelembagaan secara menyeluruh yang mencakup beberapa aspek berikut:

1. Proses pembangunan, yang meliputi formulasi kebijakan (*policy formulation*), perencanaan (*planning*), penganggaran (*budgeting*), dan penetapan peraturan (*legislation*);
2. Peranan dan tanggung jawab pemerintahan desa, dan masyarakat;
3. Sistem organisasi, yang meliputi lembaga pemerintahan desa dan lembaga masyarakat;
4. Insentif dalam pembangunan, yang mampu meningkatkan inovasi masyarakat desa dalam pembangunan;
5. Kerangka legal, yang lebih memperhatikan kondisi masyarakat desa yang beranekaragam.

2.3.2 Kelembagaan di Tingkat Desa

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 Tahun 2009 menjelaskan pengertian Perangkat Desa adalah unsur staf, pelaksana dan wilayah yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih dan diangkat tanpa melalui pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

Kemudian di dalam Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 Pasal 2 Tahun 2009 membagi Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;

2. Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Urusan Umum sebagai unsur sekretariat, Kepala Seksi sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan kepala dusun sebagai unsur kewilayahan;
3. Kepala Seksi terdiri atas kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan.

Kepala Desa merupakan jabatan eksekutif yang sejak dahulu dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai salah satu upaya untuk membatasi kekuasaan kepala desa, masa jabatannya dibatasi hanya untuk 2 periode saja (maksimum 12 tahun). Upaya instalasi nilai-nilai demokratis di tingkat desa ini juga dilakukan melalui pembentukan Badan Perwakilan Desa yang merupakan lembaga yang dipisahkan dari eksekutif (pemerintah desa) dan merupakan perwakilan masyarakat yang dipilih langsung oleh masyarakat desa.

Hubungan yang hierarkis antara desa dan kabupaten juga dihilangkan dan desa merupakan wilayah yang berlokasi di daerah kabupaten. Dengan demikian terbentuknya kebebasan masyarakat desa untuk menentukan sendiri wewenang, perangkat pemerintahan desa, dan penggunaan istilah.

Implikasi lain dari UU nomor 32/2004 dan UU nomor 33/2004 adalah lebih dekatnya masyarakat desa dengan salah satu alat produksi terpenting, yaitu dana. Alokasi dana yang lebih besar di tingkat desa akan meningkatkan kecepatan penyaluran dan ketepatan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selama ini, proses perencanaan dari bawah (*bottom-up*) tidak dapat

berjalan dengan baik antara lain diakibatkan oleh besarnya sumber dana yang masih dikelola oleh pemerintah atasan.

Hasil-hasil perencanaan yang dirumuskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes/Rembug Desa) implementasinya baru diterima masyarakat paling tidak satu tahun sejak ia direncanakan. Belum lagi, proyek yang dilaksanakan di suatu desa seringkali sangat jauh dari yang direncanakan pada Rembug Desa akibat pendekatan sektoral yang tidak layak.

2.4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .

Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD.

Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.

2.4.1 Tugas dan Fungsi BPD

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya dan di Desa Jaya Kopah pada khususnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan BPD:

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2. Fungsi BPD:

BPD mempunyai fungsi:

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Wewenang BPD :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun Tata Tertib BPD;
- g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya;
- h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa.

2.5 Masyarakat

Menurut Selo Sumardjan (2004:32) masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Konsep masyarakat tidak berdiri sendiri, tetapi erat hubungannya dengan lingkungan. Hal tersebut berarti bahwa ketika seseorang berinteraksi dengan sesamanya, maka lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi sikap-sikap, perasaan, perlakuan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungannya. Misalnya : lingkungan keluarga, para remaja yang sebaya, lingkungan kerja dan kampus. Di masing-masing lingkungan itulah ia akan termasuk sebagai anggota kelompoknya. Oleh karena itu, ia dapat menyertakan, memainkan sifat dan kehendak anggota kelompoknya bahkan kadang-kadang menciptakan, meminjam, meniru dan memperkenalkan perilaku yang berbeda dalam masyarakat.

2.5.1 Ciri-ciri Masyarakat Desa (karakteristik)

Dalam buku Sosiologi karangan Ruman Sumadilaga seorang ahli Sosiologi “Talcot Parsons” menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional (*Gemeinschaft*) yang mebngeenal ciri-ciri sebagai berikut :

1. *Afektifitas* ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta , kesetiaan dan kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan tolong menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain dan menolongnya tanpa pamrih.
2. *Orientasi kolektif* sifat ini merupakan konsekuensi dari Afektifitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan , tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat, intinya semua harus memperlihatkan keseragaman persamaan.
3. *Partikularisme* pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subyektif, perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja.(lawannya Universalisme)
4. *Askripsi* yaitu berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan.(lawanya prestasi).
5. *Kekabaran (diffuseness)*. Sesuatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Masyarakat desa menggunakan bahasa tidak langsung, untuk menunjukkan sesuatu. Dari uraian tersebut (pendapat Talcott Parson)

dapat terlihat pada desa-desa yang masih murni masyarakatnya tanpa pengaruh dari luar.

2.6 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan di antaranya adalah:

1. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
2. Pelaksanaan fungsi adalah realisasi dari apa yang telah direncanakan atau yang ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa setempat, yang berfungsi:
 - a. Fungsi menetapkan perturan desa bersama Kepala Desa.
 - b. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Dalam pengukuran ini terdapat satu variabel yang akan diukur yaitu fungsi BPD. Adapun variabel fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan indikatornya sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

- a. Baik : Apabila Badan Permusyawaratan Desa Jaya Kopah ikut terlibat dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Kurang Baik : Apabila Badan Permusyawaratan Desa Jaya Kopah tidak dapat menjalankan salah satu dari merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.
- c. Tidak Baik : Apabila Badan Permusyawaratan Desa Jaya Kopah tidak terlibat sama sekali dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

- a. Baik : Apabila Badan Permusyawaratan Desa Jaya Kopah turun langsung ke lapangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.
- b. Kurang Baik : Apabila Badan Permusyawaratan Desa Jaya Kopah hanya dapat melaksanakan salah satu dari menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- c. Tidak Baik : Apabila Badan Permusyawaratan Desa Jaya Kopah tidak dapat menjalankan sama sekali fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.8 Hipotesis

Dari latar belakang masalah penulis mengambil sebuah hipotesa sebagai berikut:

“Diduga pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (*holistic*), dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang alamiah dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh pembaca sehingga para pembaca dapat dengan mudah untuk memahami isi dan kesimpulan dari penelitian penulis.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Badan Permusyawaratan Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dari bulan Juli tahun 2011 sampai dengan selesai, karena untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jaya Kopah.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Anggota BPD Desa Jaya Kopah sebanyak 9 orang, Perangkat Desa Jaya Kopah 10 orang dan Masyarakat Desa Jaya Kopah 3.428 orang.

3.3.2 Sampel

Pengambilan sampel dari masyarakat dengan menggunakan teknik slovin sedangkan pengambilan sampel dari aparat desa dan anggota BPD Desa Jaya Kopah dengan menggunakan teknik sensus.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 : Tabel Populasi dan Sampel Dalam Penelitian

No	Jabatan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Aparat Desa	10	10	100 %
2.	Anggota BPD	9	9	100 %
3.	Masyarakat	3.428	97	100 %
Jumlah		3.447	116	100%

Sumber : Data Lapangan. 2011

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Sampel

N : Populasi

e^2 : Tingka Error 10 % (Persen Kelonggaran ketidakstabilan karena kesalahan pengambilan sampel).

Dengan demikian, adapun jumlah sampel yang diambil sebagai responden adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{3.428}{1 + 3.428 \times 0.1^2}$$

$$\begin{aligned}
& 1 + 3.428(10\%)^2 \\
n &= \frac{3.428}{1 + 3.428(0,01)} \\
n &= \frac{3.428}{1 + 34,28} \\
n &= \frac{3.428}{35,28} \\
n &= 97,16 = 97 \text{ orang (digenapkan jumlahnya)}
\end{aligned}$$

Jadi, jumlah sampel yang diambil dari populasi penduduk Desa Jaya Kopah adalah sebanyak 97 orang dan jumlah sampel dari aparat Desa Jaya Kopah 10 orang, dan Anggota BPD sebanyak 9 orang.

3.4 Jenis Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber guna memperoleh jawaban yang relevan dari permasalahan. Data primer tersebut menyangkut tentang identitas responden dan tanggapan masyarakat terhadap fungsi BPD.
2. Data skunder yaitu data yang telah jadi dan diperoleh dari instansi-instansi terkait dalam penelitian, luas wilayah, jumlah penduduk, dan lain sebagainya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap obyek yang teliti.
2. Angket yaitu upaya pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan berserta alternative jawabannya kemudian disebarkan kepada responden.
3. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung kepada responden, karena ada kalanya data yang dibutuhkan belum sempurna dengan teknik kuesioner.

3.6 Analisa Data

Setelah seluruh data terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan dan di tabulasi menurut jenis data dan serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian dan kemudian dianalisa secara deskriptif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografis Desa Jaya Kopah

Desa Jaya Kopah merupakan salah satu desa diantara 26 desa yang berada di kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas wilayah 5.900 Ha yang terbagi dalam 4 (empat) Dusun yakni : Dusun Murbai, Dusun Linjuang, Dusun Bukit Termenung dan Dusun Sei. Geringging.

Secara administrasi desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ini berbatasan dengan 4 (empat) Desa. Di tinjau dari letak geografisnya Desa Jaya Kopah mempunyai batas wilayah, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Munsalo
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Koto Tuo
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kopah dan Desa Pulau Baru
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Munsalo

Sedangkan jarak dari Kabupaten dan Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten \pm 8 Km.
2. Jarak dari pusat pemerintahan Propinsi \pm 174 Km.

Desa Jaya Kopah beriklim tropis, musim yang terdapat di Desa Jaya Kopah sama halnya dengan daerah lain yaitu dua musim, musim panas dan musim hujan. Kondisi inilah yang membuat daerah tersebut berpotensi sebagai daerah pertanian dan perkebunan.

4.2 Penduduk

Masyarakat Desa Jaya Kopah merupakan masyarakat yang hanya dihuni suku bangsa Melayu. Berdasarkan data statistik pada Kantor Desa Jaya Kopah Tahun 2011, jumlah penduduk Desa Jaya Kopah berjumlah 3447 Jiwa atau dengan jumlah Kepala Keluarga 894 KK, terdiri dari laki-laki berjumlah 1554 orang dan perempuan 1893 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Penduduk Desa Jaya Kopah Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	1554	45,08 %
2	Perempuan	1893	54,92 %
Jumlah		3447	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Jaya Kopah Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Jaya Kopah lebih didominasi perempuan dengan 1893 orang (54,92 %), Sedangkan laki-laki berjumlah 1554 orang (45,08 %).

4.3 Pemerintahan Desa

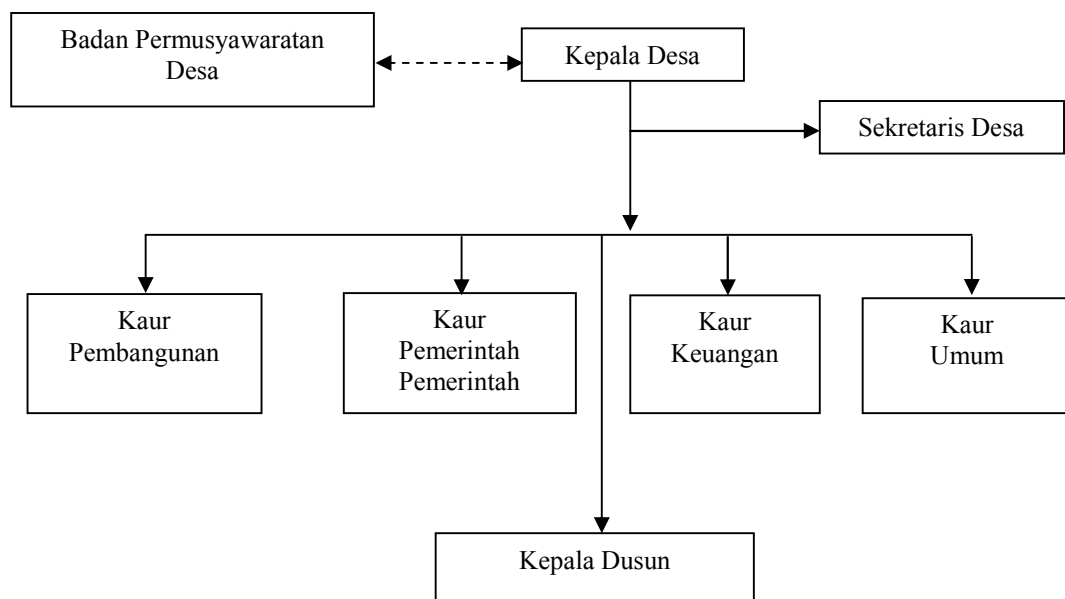
Desa Jaya Kopah merupakan Desa yang berpedoman dan berlandasan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Kepala desa atau disebut dengan nama lain dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Selanjutnya dibentuk pula dusun-dusun yang selanjutnya dipimpin oleh kepala dusun, RW (Rukun Warga), dan dibawah RW ada RT (Rukun Tetangga), Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun jumlah aparat pemerintahan Desa Jaya Kopah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Aparat Pemerintah Desa Jaya Kopah

No	Aparat Pemerintah	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa (Sekdes)	1 Orang
3	Kepala Dusun	4 Orang
4	Kaur (Ketua Urusan)	4 Orang
Jumlah		10 Orang

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Jaya Kopah Tahun 2011

Untuk menegaskan tata pembagian dan hubungan kerja unit-unit organisasi pemerintah desa, maka dijelaskan kedudukan, tugas dan fungsi unit-unit kerja dalam struktur pemerintahan desa sebagai berikut :



Dari bagan di atas diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan koordinasi dengan Kepala Desa untuk melakukan Tugas Dan Fungsinya, Adapun Kepala Desa Merupakan Pemerintahan tertinggi di tingkat Desa, yang dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, kemudian dibawah Kepala Desa terdapat 4 Kaur yang akan membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Adapun keempat Kaur tersebut adalah Kaur Pembangunan,

Kaur Pemerintahan, Kaur keuangan, dan Kaur Umum. Dan dibawah Kaur ada Dusun. Untuk di Desa Jaya Kopah terdapat 4 Dusun, yakni:

1. Dusun Murbai
2. Dusun Linjuang
3. Dusun Bukit Termenung
4. Dusun Sei Geringging

4.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial serta perekonomian seseorang. Dalam usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang baik bersifat fisik maupun non fisik (mental), membuka sekolah umum, sekolah agama di Desa Jaya Kopah. Dalam hal ini pemerintah juga tidak pernah berhenti untuk membangun dan membuat sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendidikan masyarakat agar masyarakat Desa Jaya Kopah tidak tertinggal dari desa-desa lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Jaya Kopah

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	1 Buah
2	Madrasyah Diniah Awaliyah	1 Buah
3	Sekolah Dasar Negeri	1 Buah
4	SMP N	1 Buah
Jumlah		4 Buah

Sumber Data: Kantor kepala Desa Jaya Kopah Tahun 2011

Dari tabel diatas, maka sarana dan prasarana pendidikan di Desa Jaya Kopah sudah cukup memadai, untuk meningkatkan kecerdasan anak didik, dari segi Taman Kanak-kanak sampai ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), tinggal bagaimana mengelolah manajemennya serta peran orang tua dalam menuntun anaknya agar berlomba-lomba untuk menggali ilmu Agar regenerasi muda yang akan datang siap berkompetisi baik dalam bidang agamis maupun konfensional. Berikut ini adalah keadaan tingkat pendidikan penduduk Desa Jaya Kopah Pada Tahun 2011:

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Jaya Kopah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak / Belum Tamat SD	650	19 %
2	Tamat SD / Sederajat	724	21 %
3	Tamat SMP / Sederajat	1134	33 %
4	Tamat SMA / Sederajat	898	26 %
5	Tamat Diploma	18	0,42 %
6	Tamat S1	20	0,50 %
7	Tamat S2	3	0,08 %
Jumlah		3447	100%

Sumber Data: *Kantor Kepala Desa Jaya Kopah Tahun 2011*

Dari Tabel diatas dapat kita lihat bahawa tingkat pendidikan masyarakat Desa Jaya Kopah sudah menuju kearah yang lebih baik dimana dominasi tingkat pendidikan yang tertera pada tabel diatas adalah tamatan SMP, Sehingga masyarakat Desa Jaya Kopah sudah mengetahui sesuatu yang bernilai baik terhadap apa yang dikerjakan oleh masyarakat tersebut.

4.5 Agama

Masyarakat Indonesia lebih identik dengan pendekatan agama dalam bermasyarakat, ini merupakan tradisi yang tidak bisa dilupakan bisa kita simak lagi uraian pancasila, pada panca petaman ialah ketuhanan yang maha esa, sering

terjadi komplik dinegara kita ini pemicunya adalah mengatas namakan agama, sehingga dengan hal ini pemerintah pusat yang punya wewenang dalam pengaturan agama, agar bisa mengurangi *dikotomi* dari setiap daerah, begitupun di Desa Jaya Kopah. Jadi setiap agama adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang. Masyarakat di Desa Jaya Kopah mayoritas beragama Islam. Tidak ada penduduk yang menganut agama lain.

Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah, di dukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam menjalankan agamanya. Sarana rumah ibadah di Desa Jaya Kopah hanya terdapat bagi masyarakat yang beragama Islam dan tidak ada untuk agama lain. Banyaknya sarana ibadah bagi masyarakat yang beragama Islam dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Tempat Ibadah di Desa Jaya Kopah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1 Buah
2	Musholla	5 Buah
Jumlah		6 Buah

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Jaya Kopah Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Desa Jaya Kopah telah memiliki sarana yang cukup untuk melaksanakan ibadah. Keberadaan sarana ibadah (mesjid dan musholla) ini selain digunakan sebagai tempat beribadah, juga difungsikan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni baca Al-Qur'an, tempat pelaksanaan wirid agama dan tempat pengajian bagi remaja dan orang tua.

4.6 Perekonomian

Ditinjau dari segi sosial ekonomi masyarakat Desa Jaya Kopah pada umumnya mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam yang sebagian besarnya yaitu mempunyai mata pencaharian petani karet dan kelapa sawit, dan lain-lain. Adapun jenis mata pencaharian pada masyarakat Desa Jaya Kopah dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Mata Pencaharian Penduduk Desa Jaya Kopah

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
	Petani	1420	42 %
	PNS	148	4 %
	Wiraswasta	498	14 %
	Tanggungan Orang tua dll	1381	40%
	Jumlah	3447	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Jaya Kopah

Dari data diatas terlihat bahwa mayoritas penduduk Desa Jaya Kopah Berkerja Sebagai Petani yaitu sebanyak 1420 orang (42%) sedangkan mata pencaharian yang paling sedikit adalah PNS sebanyak 148 orang (4%) selanjutnya yang berkerja sebgai Wiraswasta sebanyak 498 orang (14%). Sisanya masih dalam tanggungan orang tua dan lain-lainnya sebanyak 1381 orang (40%).

4.7 Budaya

Masyarakat Desa Jaya Kopah pada dasarnya adalah suku Melayu, Sebagai masyarakat yang patuh pada tatanan pemerintah, masyarakat Desa Jaya Kopah masih kental berpegang teguh dengan adat-istiadat yang berlaku. Oleh karena itu ninik mamak sangat besar perannya dalam melindungi dan membimbing anak kemenakannya. Dengan istilah anak dipangku, kemenakan dibimbing, hal

tersebutlah yang membuat kehidupan masyarakat Desa Jaya Kopah selalu hidup harmonis dan besahaja.

Selain peran ninik mamak yang sangat besar pada masyarakat Desa Jaya Kopah, juga terdapat budaya daerah yang masih terus dilaksana oleh masyarakat, diantaranya :

1. Mandi Balimau

Mandi balimau merupakan tradisi masyarakat yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Jaya Kopah. Mandi balimau ini dilaksanakan ketika akan memasuki bulan suci Ramadhan dengan tujuan untuk membersihkan diri.

2. Musik Tradisional

Adapun musik tradisional masyarakat Desa Jaya Kopah adalah Randai, dan Kayat. Musik tradisional ini digunakan dalam acara seperti; perkawinan, sunatan (khitan), atau acara-acara Adat lainnya.

3. Perkumpulan Wirid Yassin

Masyarakat Desa Jaya Kopah telah lama membudayakan kerja sama dan persaudaraan seperti perkumpulan wirid Yassin perkumpulan ini bertujuan untuk mendoakan masyarakat yang mengalami musibah meninggal dunia dengan cara membaca surah Yassin bersama-sama.

4.8 Kesehatan

Dalam melayani masyarakat dibidang kesehatan, pemerintah telah mendirikan satu buah puskesmas yang buka setiap hari senin sampai dengan hari sabtu bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Bila dilihat dari

intensitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa Jaya Kopah yang membuka Puskesmas dari hari senin sampai hari sabtu, masih dirasakan kurang oleh masyarakat akibat kurangnya alat medis yang tersedia. Akan tetapi karena Desa Jaya Kopah dekat dengan Ibu Kota Kabupaten maka masyarakat Desa Jaya Kopah biasanya datang berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Demi menunjang keakuratan dalam penelitian sehubungan dengan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka perlu disajikan identitas responden dari unsur anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat yang menyangkut jenis kelamin, tingkat umur dan tingkat pendidikan sehingga dengan penjabaran identitas dapat mempermudah proses penelitian sekaligus tingkat pemahaman respondenya.

Berikut akan digambarkan identitas responden dilihat dari perbedaan jenis kelamin sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1 Jumlah Responden (BPD, Aparat Desa dan Masyarakat) Menurut Jenis Kelamin

No	Responden	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-Laki	Perempuan		
1	BPD	9	-	9	7,75
2	Aparat Desa	10	-	10	8,62
3	Masyarakat	70	27	97	83,62
Jumlah				116	100%

Sumber : *Data Olahan 2011*

Dari tabel 5.1 di atas dapat kita lihat bahwa sebagian besar responden penelitian ini adalah laki-laki, di mana responden laki-laki dari BPD berjumlah 9 orang atau sekitar 7,75 % dari pihak Aparat Desa 10 orang atau sekitar 8,62 % dan dari pihak masyarakat berjumlah 97 orang atau sekitar 83,62%.

Selanjutnya untuk melihat tingkat umur, peneliti membatasi responden yang memiliki tingkat umur dari 25 tahun sampai 55 tahun, sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.2 Jumlah Responden (BPD, Aparat Desa dan Masyarakat) Menurut Tingkat Umur

No	Pendidikan Responden	Jumlah	Persentase
1	25 s/d 35 Tahun	20	17,24%
2	36 s/d 50 Tahun	85	73,27%
3	51 s/d 55 Tahun	11	9,48%
Jumlah		116	100 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan 2011*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa responden didominasi dengan masih produktif yaitu berkisar dari umur 25 sampai 50 tahun yaitu sebanyak 85 orang atau sekitar 73,27%. Sedangkan responden yang tidak produktif sebanyak 11 orang atau sekitar 9,48%.

Kemudian untuk mengetahui tingkat pendidikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jaya Kopah dapat kita lihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.3 Jumlah Responden Badan Permusyawaratan Desa, menurut tingkat pendidikan

No	Pendidikan Responden	Jumlah	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	7	77,78%
4	DIPLOMA	-	-
5	Sarjana (S1)	1	11,11%
6	Pasca Sarjana (S2)	1	11,11%
Jumlah		9	100%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan responden dari Badan Permusyawaratan Desa Jaya Kopah sudah cukup baik dengan dilihat

adanya anggota BPD yang berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana, Meskipun secara mayoritas pendidikan anggota BPD adalah Tamatan SMA yaitu sebanyak 7 orang atau (77,78).

Selanjutnya untuk melihat tingkat pendidikan dari kalangan Aparat Desa dapat kita lihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.4 Jumlah Responden Aparat Desa Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Responden	Jumlah	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	9	90%
4	DIPLOMA	-	-
5	Sarjana (S1)	1	10%
6	Pasca Sarjana (S2)	-	-
Jumlah		10	100%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas Aparat desa memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 9 orang atau (90%) sedangkan aparat yang memiliki pendidikan perguruan tinggi (S1) hanya 1 orang atau (10%).

Adapun untuk melihat tingkat pendidikan responden dari kalangan masyarakat dapat kita lihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.5 Jumlah Responden dari Masyarakat Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Responden	Jumlah	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	14	14,43%
3	SMA	70	72,16%
4	DIPLOMA	3	3,09%
5	Sarjana (S1)	10	10,30%
6	Pasca Sarjana (S2)	-	-
Jumlah		97	100%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dari 97 orang responden dari kalangan masyarakat, didominasi oleh masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 70 orang atau (72,16%) dan yang paling sedikit adalah 3 orang dari tamatan Diploma yaitu sebanyak 3 orang atau sekitar (3,09%).

5.2 Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .

Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki dua Fungsi utama dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Fungsi Pertama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah Menetapkan Peraturan Desa (Perdes) dimana dalam menetapkan peraturan ini BPD bersama-sama dengan Kepala Desa melalui garis Hubungan timbal balik melakukan

diskusi dan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk menetapkan Peraturan Desa yang telah dibuat.

Untuk mengetahui pelaksanaan Fungsi BPD Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dari fungsinya sebagai Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, melalui tanggapan dari responden dapat kita lihat dari tabel berikut:

Tabel 5.6 Tanggapan Responden Mengenai Sudahkah BPD Membuat Peraturan Desa

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Sudah	9	7,75 %
	Belum	-	-
	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		9	7,75%

Sumber : *Hasi Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Anggota BPD di atas dapat kita ketahui bahwa keseluruhan anggota BPD menjawab Sudah membuat peraturan desa dengan jumlah 9 orang dan persentase 7,75%.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Sudah	8	6,89 %
	Belum	2	1,72 %
	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		10	8,61%

Sumber : *Hasi Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Aparat Desa di atas dapat kita ketahui bahwa 8 orang atau 6,89% Aparat Desa menjawab Sudah, sedangkan 2 orang (1,72%) lainnya menjawab BPD belum pernah membuat peraturan Desa.

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Sudah	18	15,51 %
	Belum	47	40,51 %
	Tidak Tahu	32	27,88 %
Jumlah		97	83,9%

Sumber : *Hasi Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel Jawaban Masyarakat di atas dapat kita ketahui bahwa sebanyak 47 orang (40,51%) responden menjawab Belum dan yang paling sedikit yaitu 18 orang (15,51%) responden menjawab BPD Sudah membuat peraturan Desa.

Dari ke tiga tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 116 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bawa BPD Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Belum membuat peraturan-peraturan desa yaitu sebanyak 49 orang atau 42,24% dari keseluruhan responden baik dari masyarakat maupun Aparat desa sedangkan dari Pihak BPD keseluruhan responden mengatakan sudah membuat peraturan desa yaitu sebanyak 9 orang (7,75%). Dari hasil penelitian dilapangan peneliti menemukan bahwa hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya untuk menghadiri rapat BPD, sehingga asumsi masyarakat lebih kepada belum adanya peraturan yang dibuat oleh BPD padahal pada kenyataannya sudah terdapat beberapa peraturan yang telah ditetapkan, seperti siskamling, dan lain sebagainya.

Tabel 5.7 Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan dalam Pembuatan Peraturan Desa

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Tahu	7	6,03 %
	Kurang Tahu	2	1,72 %
	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		9	7,75 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel jawaban BPD di atas, dapat kita lihat bahwa dari 9 orang Anggota BPD, 7 orang (6,03%) menjawab Tahu, dan 2 orang (1,72%) menjawab kurang tahu dalam pembuatan Peraturan Desa.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Tahu	6	5,17 %
	Kurang Tahu	4	3,44 %
	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		10	8,61%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel jawaban Aparat Desa di atas, dapat kita lihat bahwa dari 10 orang Aparat Desa, 6 orang (5,17%) menjawab Tahu, dan 4 orang (3,44%) menjawab kurang tahu dalam pembuatan Peraturan Desa.

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Tahu	30	25,86 %
	Kurang Tahu	47	40,51 %
	Tidak Tahu	20	17,25 %
Jumlah		97	83,44 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel jawaban Masyarakat di atas, dapat kita lihat bahwa dari 97 orang Masyarakat, 30 orang (25,86%) menjawab Tahu, 47 orang (40,51%)

menjawab kurang tahu dan 20 orang (17,25%) menjawab Tidak Tahu dalam pembuatan Peraturan Desa.

Dari ketiga tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari 116 responden, mayoritas mengatakan bahwa pengetahuan mereka tentang pembuatan peraturan desa masih dalam kategori Kurang Tahu yaitu sebanyak 53 orang atau 45,68 % dari keseluruhan responden dengan klasifikasi dari BPD sebanyak 2 orang (1,72%), dari aparat desa sebanyak 4 orang (3,44%) dan masyarakat sebanyak 47 orang (40,51%). Adapun informasi yang peneliti dapatkan di lapangan yang membuat rendahnya pengetahuan responden mengenai pembuatan peraturan desa adalah kurangnya sosialisasi BPD dalam memberikan informasi tentang sistematika atau tatacara pembuatan peraturan desa.

Tabel 5.8 Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan Dalam Rapat yang dilakukan oleh BPD

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Selalu	9	7,75 %
	Kadang-Kadang	-	-
	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		9	7,75 %

Sumber : *Hasi Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Anggota BPD di atas dapat kita ketahui bahwa keseluruhan anggota BPD menjawab Selalu ikut dalam rapat yang di adakan oleh BPD dengan jumlah 9 orang dan persentase 7,75%.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Selalu	8	6,89 %
	Kadang-Kadang	1	0,86 %
	Tidak Pernah	1	0,86 %
Jumlah		10	8,61%

Sumber : *Hasi Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Aparat Desa di atas, dapat kita lihat bahwa dari 10 orang Aparat Desa, 8 orang (6,89%) menjawab Selalu, 1 orang (0,86%) menjawab Kadang-Kadang dan 1 orang (0,86%) menjawab tidak pernah ikut dalam rapat yang di adakan oleh BPD.

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Selalu	3	2,58 %
	Kadang-Kadang	51	43,96 %
	Tidak Pernah	43	37,06 %
Jumlah		97	83,6 %

Sumber : *Hasi Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Masyarakat di atas, dapat kita lihat bahwa dari 97 orang Masyarakat, 3 orang (2,58%) menjawab Selalu, 51 orang (43,96%) menjawab Kadang-Kadang dan 43 orang (37,06%) menjawab tidak pernah ikut dalam rapat yang di adakan oleh BPD.

Dari ketiga tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 116 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa hanya sesekali mengikuti rapat yang di adakan oleh BPD yaitu sebanyak 52 orang atau sekitar 44,82% dengan klasifikasi dari BPD tidak ada, dari aparat desa 1 orang (0,86%), sedangkan dari masyarakat sebanyak 51 orang (43,96%). Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, ternyata hal ini dikarenakan oleh kurangnya komunikasi, serta kurangnya sarana dan

prasarana yang mendukung kegiatan rapat yang dilakukan oleh BPD, seperti tidak adanya kantor atau gedung rapat yang tetap untuk mengadakan kegiatan rapat tersebut.

Tabel 5.9 Tanggapan Responden Tentang Hasil Peraturan Yang Telah Ditetapkan

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Baik	7	6,03 %
	Kurang Baik	2	1, 72 %
	Tidak Baik	-	-
Jumlah		9	7,75%

Sumber : *Hasi Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabe BPD di atas, dapat kita lihat bahwa dari 9 orang BPD, 7 orang (6,03%) menjawab baik dan 2 orang (1,72%) menjawab hasil peraturan yang di tetapkan masih dalam kategori kurang baik.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Baik	6	5,17 %
	Kurang Baik	4	3,44 %
	Tidak Baik	-	-
Jumlah		10	8,61

Sumber : *Hasi Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Aparat Desa di atas, dapat kita lihat bahwa dari 10 orang Aparat Desa, 6 orang (5,17%) menjawab baik dan 4 orang (3,44) menjawab hasil peraturan yang di tetapkan masih dalam kategori kurang baik.

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Baik	9	7,75 %
	Kurang Baik	70	60,34 %
	Tidak Baik	18	15,51 %
Jumlah		97	83,6 %

Sumber : *Hasi Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Masyarakat di atas, dapat kita lihat bahwa dari 97 orang Masyarakat, 9 orang (7,75%) menjawab Baik, 70 orang (60,34%) menjawab Kurang Baik dan 18 orang (15,51%) menjawab hasil peraturan yang ditetapkan masih dalam kategori kurang baik.

Dari ketiga tabel di atas tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 116 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa hasil dari peraturan yang telah ditetapkan oleh BPD dan Aparat Desa masih dalam kategori Kurang Baik yaitu Sebanyak 76 orang atau 65,61% responden yang mengatakan demikian dengan klasifikasi dari BPD sebanyak 2 orang (1,72%), Aparat Desa sebanyak 4 orang (3,44%) dan Masyarakat 70 orang (60,34%). Dari informasi yang peneliti dapatkan dilapangan, setelah peraturan dirumuskan dan ditetapkan, tetapi pelaksanaan dari peraturan tersebut belum maksimal sehingga hasil yang diinginkan dari penetapan peraturan tersebut belum dapat terlihat.

Tabel 5.10 Tanggapan Responden Mengenai Hubungan Koordinasi Antara BPD dengan Aparat Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Baik	8	6,89 %
	Kurang Baik	1	0,86 %
	Tidak Baik	-	-
Jumlah		9	7,75%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel BPD di atas, dapat kita lihat bahwa dari 9 orang BPD, 8 orang (6,89%) menjawab baik dan 1 orang (0,86%) menjawab hubungan koordinasi antara BPD dengan Aparat Desa masih dalam kategori kurang baik.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Baik	5	4,31 %
	Kurang Baik	5	4,31 %
	Tidak Baik	-	-
Jumlah		10	8,61%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Aparat Desa di atas, dapat kita lihat bahwa dari 10 orang Aparat Desa, 5 orang (4,31%) menjawab baik dan 5 orang (4,31) menjawab hubungan koordinasi antara BPD dengan Aparat Desa masih dalam kategori kurang baik.

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Baik	20	17,24 %
	Kurang Baik	46	39,65 %
	Tidak Baik	31	26,72 %
Jumlah		97	83,6 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Masyarakat di atas, dapat kita lihat bahwa dari 97 orang Masyarakat, 20 orang (17,24%) menjawab Baik, 46 orang (39,65%) menjawab Kurang Baik dan 31 orang (26,72%) menjawab hubungan koordinasi antara BPD dengan Aparat Desa masih dalam kategori kurang baik.

Dari ketiga tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari 116 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa hubungan Koordinasi antara BPD dalam penerapan peraturan desa Kurang Baik, yaitu sebanyak 52 orang atau 44,82% dengan klasifikasi dari BPD sebanyak 1 orang (0,86 %), dari Aparat Desa 5 orang (4,31%) serta Masyarakat sebanyak 46 orang (39,65%). Mereka berpendapat, hal ini dikarenakan oleh kurangnya komunikasi dari pihak Aparat Desa dengan BPD, sehingga terkadang hanya sebagian kecil dari BPD atau sebagian kecil dari Aparat Desa Saja yang menghadiri rapat-rapat atau kegiatan lainnya. Hal ini merupakan indikasi dari Kurangnya koordinasi antara BPD dan Aparat Desa.

Tabel 5.11 Tanggapan Responden Mengenai Kesesuaian Penetapan Peraturan Dengan Masalah Yang Ada

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Sudah	6	5,17 %
	Belum	2	1,72 %
	Tidak Tahu	1	0,86 %
Jumlah		9	7,75

Sumber : *Hasi Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabe BPD di atas, dapat kita lihat bahwa dari 9 orang BPD, 6 orang (5,17%) menjawab sudah, 2 orang (1,72%) menjawab belum dan 1 orang (0,86%) menjawab tidak tahu mengenai kesesuaian penetapan peraturan dengan masalah yang ada.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Sudah	7	6,03 %
	Belum	1	0,86 %
	Tidak Tahu	2	1,72 %
Jumlah		10	8,61%

Sumber : *Hasi Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Aparat Desa di atas, dapat kita lihat bahwa dari 10 orang Aparat Desa, 7 orang (6,03%) menjawab sudah, 1 orang (0,86%) menjawab belum dan 2 orang (1,72%) menjawab tidak tahu mengenai kesesuaian penetapan peraturan dengan masalah yang ada.

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Sudah	11	9,48 %
	Belum	78	67,26 %
	Tidak Tahu	8	6,89 %
Jumlah		97	83,6%

Sumber : *Hasi Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Masyarakat di atas, dapat kita lihat bahwa dari 97 orang Masyarakat, 11 orang (9,48%) menjawab Sudah, 78 orang (67,26%) menjawab Belum dan 8 orang (26,72%) menjawab tidak tahu mengenai kesesuaian penetapan peraturan dengan masalah yang ada.

Dari ketiga tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 116 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa setiap peraturan yang ditetapkan oleh BPD dan Aparat Desa masih Belum sesuai dengan permasalahan yang ada di Desa Jaya Kopah yaitu sebanyak 81 responden atau 69,82%, dengan klasifikasi dari BPD sebanyak 2 orang (1,72%), Aparat Desa sebanyak 1 orang (0,86%) dan Masyarakat sebanyak 78 orang (67,26%). Dari hasil penelitian lapangan yang peneliti lakukan, hal ini disebabkan karena kurang tanggapnya pihak BPD dan Aparatur Desa dalam melihat permasalahan umum yang terjadi pada masyarakatnya. Sehingga peraturan yang dirumuskan dan ditetapkan tersebut belum sesuai dengan masalah yang terjadi di masyarakat.

Tabel 5.12 Tanggapan Responden Mengenai Dampak Positif dari Penetapan Peraturan Desa Untuk Kemajuan Desa

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Sudah	8	6,89 %
	Belum	1	0,86 %
	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		9	7,75 %

Sumber : *Hasi Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel BPD di atas, dapat kita lihat bahwa dari 9 orang BPD, 8 orang (6,89%) menjawab sudah, dan 1 orang (0,86 %) menjawab belum ada dampak positif dari Penetapan Peraturan Desa Untuk Kemajuan Desa.

2. Jawaban Aprat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Sudah	4	3,44%
	Belum	3	2,58%
	Tidak Tahu	3	2,58%
Jumlah		10	8,61 %

Sumber : *Hasi Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Aparat Desa di atas, dapat kita lihat bahwa dari 10 orang Aparat Desa, 4 orang (3,44%) menjawab sudah, 3 orang (2,58%) menjawab belum dan 3 orang (2,58%) menjawab tidak tahu mengenai dampak positif dari Penetapan Peraturan Desa Untuk Kemajuan Desa

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Sudah	4	3,44%
	Belum	54	46,55%
	Tidak Tahu	39	33,62%
Jumlah		97	83,6 %

Sumber : *Hasi Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Masyarakat di atas, dapat kita lihat bahwa dari 97 orang Masyarakat, 4 orang (3,44%) menjawab Sudah, 54 orang (46,55%) menjawab Belum dan 39 orang (33,62%) menjawab tidak tahu mengenai dampak positif dari Penetapan Peraturan Desa Untuk Kemajuan Desa.

Dari ketiga tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 116 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa Belum ada dampak positif yang ditimbulkan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pihak BPD dan Aparat Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebanyak 58 orang responden atau 50 % dengan klasifikasi dari BPD sebanyak 1 orang (0,86%), Aparat Desa sebanyak 3 orang (2,58) serta

Masyarakat sebanyak 54 orang (46%). Peneliti menemukan bahwa hal ini dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan sehingga dampak yang dihasilkan demi kemajuan desapun belum terlihat.

Tabel 5.13 Tanggapan Responden Mengenai Keikutsertaan dalam Pembuatan Peraturan Desa

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Selalu	7	6,03 %
	Kadang-Kadang	2	1,72 %
	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		9	7,75 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Anggota BPD di atas dapat kita ketahui bahwa 7 orang (6,03%) Anggota BPD menjawab Selalu, dan 2 orang (1,72%) menjawab Kadang-kadang ikut dalam pembuatan peraturan desa.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Selalu	6	5,17 %
	Kadang-Kadang	3	2,58 %
	Tidak Pernah	1	0,86 %
Jumlah		10	8,61 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Aparat Desa di atas, dapat kita lihat bahwa dari 10 orang Aparat Desa, 6 orang (5,17%) menjawab Selalu, 3 orang (2,58 %) menjawab Kadang-Kadang dan 1 orang (0,86%) menjawab tidak pernah ikut dalam pembuatan peraturan desa.

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Selalu	17	14,65 %
	Kadang-Kadang	48	41,37 %
	Tidak Pernah	32	27,58 %
Jumlah		97	83,6 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Masyarakat di atas, dapat kita lihat bahwa dari 97 orang Masyarakat, 17 orang (14,65 %) menjawab Selalu, 48 orang (41,37 %) menjawab Kadang-Kadang dan 32 orang (27,58 %) menjawab tidak pernah ikut dalam pembuatan peraturan desa.

Dari ketiga tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari 116 responden, mayoritas mengatakan keikutsertaan mereka dalam pembuatan peraturan desa yaitu pada kategori kadang-kadang dengan jumlah 53 orang atau 45,68 % dengan klasifikasi dari BPD sebanyak 2 orang (1,72%), Aparat Desa sebanyak 3 orang (2,58%), serta Masyarakat sebanyak 48 orang (41,37%), dengan alasan kesibukan mereka masing masing sehingga sering tidak hadir dalam rapat pembuatan peraturan desa.

Tabel 5.14 Tanggapan Responden mengenai keikutsertaan dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Selalu	8	6,89 %
	Kadang-Kadang	1	0,86 %
	Tidak Pernah	-	
Jumlah		9	7,75 %

Sumber : *Hasi Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Anggota BPD di atas dapat kita ketahui bahwa 8 orang (6,89 %) Anggota BPD menjawab Selalu, dan 1 orang (0,86%) menjawab Kadang-kadang ikut dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Selalu	5	4,31 %
	Kadang-Kadang	4	3,44 %
	Tidak Pernah	1	0,86 %
Jumlah		10	8,61 %

Sumber : *Hasi Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Aparat Desa di atas, dapat kita lihat bahwa dari 10 orang Aparat Desa, 5 orang (4,31 %) menjawab Selalu, 4 orang (3,44 %) menjawab Kadang-Kadang dan 1 orang (0,86%) menjawab tidak pernah ikut dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa.

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Selalu	3	2,58 %
	Kadang-Kadang	55	47,41 %
	Tidak Pernah	39	33,62 %
Jumlah		97	83,6 %

Sumber : *Hasi Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Masyarakat di atas, dapat kita lihat bahwa dari 97 orang Masyarakat, 3 orang (2,58 %) menjawab Selalu, 55 orang (47,41 %) menjawab Kadang-Kadang dan 39 orang (33,62 %) menjawab tidak pernah ikut dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa.

Dari ketiga tabel di atas dapat kita lihat bahwa dari 116 responden, mayoritas dari mereka yaitu sebanyak 60 orang responden atau (57,72%) mengatakan hanya sesekali ikut dalam menetapkan perumusan dan penetapan

Peraturan Desa, dan bahkan ada yang menjawab tidak pernah mengikuti rapat penetapan peraturan desa yaitu 40 orang atau 34,48 %, dengan klasifikasi dari BPD sebanyak 1 orang (0,86%), Aparat Desa sebanyak 4 orang (3,44%) dan masyarakat sebanyak 55 orang (47,41%) dimana dari hasil penelitian dilapangan para responden berpendapat hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi baik dari pihak Ketua BPD, Aparat Desa, dan Masyarakat yang dikarenakan oleh kesibukan masing-masing sehingga dalam perumusan dan penetapan peraturan desa hanya melibatkan Sebagian anggota BPD dan Aparat Desa saja.

Tabel 5.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Fungsi BPD dalam Menetapkan Peraturan Desa.

No	Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		A	B	C	
1	Sudahkan BPD Membuat Peraturan Desa	35	49	32	116
2	Mengetahui Cara Membuat Peraturan Desa	43	53	20	116
3	Ikut Serta Dalam Rapat	20	52	44	116
4	Hasil Peraturan Yang Ditetapkan	22	76	18	116
5	Koordinasi BPD dengan Aparat Desa	33	52	31	116
6	Kesesuaian Penetapan Peraturan Desa Dengan Masalah yang ada	24	81	11	116
7	Dampak Positif dari Penetapan Peraturan desa	16	58	42	116
8	Ikut Serta Dalam Pembuatan Peraturan Desa	30	53	33	116
9	Ikut Serta Dalam Merumuskan Dan Menetapkkn Peraturan Desa	16	60	40	116
Jumlah Rata-Rata		27	59	30	116
Persentase		23,27 %	50,86%	25,86%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel rekapitulasi di atas tentang Tanggapan Responden dari indikator Fungsi BPD dalam Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dapat kita lihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tugasnya sebagai menetapkan peraturan Desa Belum Berfungsi dengan Baik, hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan Aparat Desa Serta Masyarakat yang disebabkan oleh kesibukan masing-masing sehingga dalam merumuskan dan menetapkan peraturan Desa hanya melibatkan sebagian anggota BPD dan Aparat Desa saja, selain itu, kurangnya sarana dan prasarana juga menghambat kelancaran Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan tugasnya, karena harus melaksanakan rapat pada tempat yang berbeda-beda.

Fakta lain yang membuktikan tidak berjalanya fungsi BPD dalam Menetapkan Peraturan desa bersama Kepala Desa adalah sulitnya mendapatkan kesepakatan yang bulat dalam Menetapkan peraturan yang dilakukan dalam rapat dan seolah-olah dipaksakan adapun peraturan yang telah ditetapkan oleh BPD Desa Jaya Kopah Hingga Saat ini hanya ada 3 (tiga) Peraturan desa yang meliputi a) Tata Tertib Desa b) Tata Tertib BPD c) Pendapatan Asli Desa (PAD). Dari sini dapat kita lihat bahwa dari ketiga peraturan desa tersebut semuanya hanya mengacu pada pelaksanaan teknis pemerintahan antara BPD dengan Aparat Desa, sedangkan peraturan-peraturan Desa lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat sama sekali belum pernah ditetapkan. Hal ini yang menjadikan dasar

bagi peneliti untuk menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD sebagai pembuat peraturan desa belum berjalan dengan baik.

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Fungsi Kedua Dari Badan Permusyawaratan Desa menurut Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa. Dengan demikian, aparat desa harus mampu menjalankan fungsi tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk melihat tanggapan Responden mengenai pelaksanaan fungsi BPD dalam hal Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dapat kita lihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 5.16 Tanggapan Responden Mengenai Pernah atau Tidaknya BPD menyalurkan Aspirasi Masyarakat

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Selalu	9	7,75 %
	Kadang-Kadang	-	-
	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		9	7,75 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahu 2011

Dari tabel jawaban Anggota BPD di atas dapat kita ketahui keseluruhan anggota BPD sebanyak 9 orang (7,75%) menjawab Selalu dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Selalu	8	6,89 %
	Kadang-Kadang	2	1,72 %
	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		10	8,61 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahu 2011*

Dari tabel jawaban Aparat Desa di atas, dapat kita lihat bahwa dari 10 orang Aparat Desa, 8 orang (6,89 %) menjawab Selalu, 2 orang (1,72 %) menjawab Kadang-Kadang dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Selalu	11	9,48 %
	Kadang-Kadang	72	62,06 %
	Tidak Pernah	14	12,06 %
Jumlah		97	83.6 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahu 2011*

Dari tabel jawaban Masyarakat di atas, dapat kita lihat bahwa dari 97 orang Masyarakat, 11 orang (9,48 %) menjawab Selalu, 72 orang (62,06 %) menjawab Kadang-Kadang dan 14 orang (12,06 %) menjawab tidak pernah ikut dalam dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dari ketiga tabel di atas dapat kita lihat bahwa dari 116 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa dalam hal pernah atau tidaknya BPD menyalurkan Aspirasi dari masyarakat masih dalam kategori Kadang-kadang dengan jumlah 74 orang atau 63,79 %, dengan klasifikasi dari BPD tidak ada yang menjawab kadang-kadang, Aparat Desa 2 orang (1,72%) dan Masyarakat 72 orang (62,06). hasil penelitian menunjukan bahwa hal ini terjadi karena masih banyak aspirasi masyarakat yang belum ditampung dan disalurkan oleh BPD kepada instansi yang berwenang.

Tabel 5.17 Tanggapan Responden Tentang BPD yang Turun Langsung ke Lapangan Untuk Menyerap dan Menampung aspirasi Masyarakat

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Selalu	7	6,03 %
	Kadang-Kadang	1	0,86 %
	Tidak Pernah	1	0,86 %
Jumlah		9	7,75 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel jawaban Anggota BPD di atas dapat kita lihat dari 9 orang anggota BPD, 7 orang (6,03 %) menjawab Selau, 1 orang (0,86%) menjawab Kadang-Kadang dan 1 orang (0,86%) menjawab Tidak Pernah Turun Langsung ke Lapangan Untuk Menyerap dan Menampung aspirasi Masyarakat.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Selalu	4	3,44 %
	Kadang-Kadang	3	2,58 %
	Tidak Pernah	3	2,58 %
Jumlah		10	8,61 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel jawaban Aparat Desa di atas, dapat kita lihat bahwa dari 10 orang Aparat Desa, 4 orang (3,44 %) menjawab Selalu, 3 orang (2,58%) menjawab Kadang-Kadang dan 3 orang (2,58%) menjawab tidak pernah Turun Langsung ke Lapangan Untuk Menyerap dan Menampung aspirasi Masyarakat.

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Selalu	4	3,44 %
	Kadang-Kadang	66	56,89 %
	Tidak Pernah	27	23,27 %
Jumlah		97	83,6 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Masyarakat di atas, dapat kita lihat bahwa dari 97 orang Masyarakat, 4 orang (3,44 %) menjawab Selalu, 66 orang (56,89 %) menjawab Kadang-Kadang dan 27 orang (23,27%) menjawab tidak pernah Turun Langsung ke Lapangan Untuk Menyerap dan Menampung aspirasi Masyarakat.

Dari ketiga tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 116 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa BPD Hanya Kadang-Kadang atau sesekali turun langsung ke lapangan untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat yaitu Sebanyak 70 orang atau 60,34% responden yang mengatakan demikian dengan klasifikasi dari BPD sebanyak 1 orang (0,86%), Aparat Desa sebanyak 3 orang (2,58%) dan Masyarakat sebanyak 66 orang (56,89%). Alasannya yaitu kurangnya rasa tanggung jawab dan kesadaran dari pihak BPD dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat untuk menyerap aspirasi mereka yang kemudian aspirasi tersebut disalurkan kepada pihak atau instansi yang berwenang.

Tabel 5.18 Tanggapan Responden Tentang Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kepada Instansi Yang Berwenang

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Sudah	8	6,89 %
	Sedikit	1	0,86 %
	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		9	7,75 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel jawaban BPD di atas dapat kita lihat bahwa dari 9 orang anggota BPD, 8 orang (6,89%) menjawab Sudah, dan 1 orang (0,86%) menjawab hanya sedikit penyaluran aspirasi masyarakat kepada instansi yang berwenang.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Sudah	6	5,17 %
	Sedikit	3	2,58 %
	Tidak Pernah	1	0,86 %
Jumlah		10	8,61 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel jawaban Aparat Desa di atas dapat kita lihat bahwa dari 10 orang aparat desa, 6 orang (5,17 %) menjawab Sudah, 3 orang (2,58 %) menjawab sedikit dan 1 orang (0,86%) menjawab tidak pernah menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi yang berwenang.

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Sudah	2	1,72 %
	Sedikit	56	48,27 %
	Tidak Pernah	39	33,62 %
Jumlah		97	83,6 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel jawaban Masyarakat di atas dapat kita lihat bahwa dari 97 orang masyarakat, 2 orang (1,72 %) menjawab Sudah, 56 orang (48,27 %) menjawab sedikit dan 39 orang (33,62%) menjawab tidak pernah menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi yang berwenang.

Berdasarkan ketiga tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 116 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa hanya sedikit aspirasi masyarakat yang disalurkan oleh Badan Badan Permusyawaratan Desa Kepada instansi yang berwenang yaitu sebanyak 60 orang atau 57,72% responden yang mengatakan demikian dengan klasifikasi dari BPD sebanyak 1 orang (0,86%), Aparat Desa sebanyak 3 orang (2,58%), dan masyarakat sebanyak 56 orang (48,27%). Hal ini terjadi karena kurang optimalnya pelaksanaan fungsi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, dimana hal tersebut ditandai dengan belum sepenuhnya aspirasi masyarakat yang terealisasikan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Aparat Desa maupun Aparat yang jenjangnya lebih tinggi dari Desa.

Tabel 5.19 Tanggapan Responden Tentang Kinerja BPD dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Baik	9	7,75 %
	Kurang Baik	-	-
	Tidak Baik	-	-
Jumlah		9	7,75 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel jawaban BPD di atas dapat kita lihat bahwa keseluruhan anggota BPD yaitu sebanyak 9 orang (7,75%) menjawab Kinerja BPD dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat termasuk dalam kategori baik.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Baik	-	-
	Kurang Baik	5	4,31 %
	Tidak Baik	5	4,31 %
Jumlah		10	8,61 %

Dari tabel jawaban Aparat Desa di atas dapat kita lihat dari 10 orang aparat Desa, 5 orang (4,31%) mengatakan Kurang Baik dan 5 orang (4,31%) mengatakan Kinerja BPD dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat masih dalam kategori tidak baik.

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Baik	-	-
	Kurang Baik	63	54,31 %
	Tidak Baik	34	29,31 %
Jumlah		97	83,6 %

Dari tabel jawaban Masyarakat di atas dapat kita lihat dari 97 orang Masyarakat, 63 orang (54,31 %) mengatakan Kurang Baik dan 34 orang (29,31%) mengatakan Kinerja BPD dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat masih dalam kategori tidak baik.

Dari ketiga tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 116 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa kinerja dari BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat masih dalam kategori Kurang Baik yaitu Sebanyak 68 orang atau 58,62% responden yang mengatakan demikian dengan

klasifikasi dari BPD tidak ada yang menjawab kurang baik, dari Aparat Desa sebanyak 5 orang (4,31%) dan Masyarakat sebanyak 63 orang (54,31%). Dari hasil penelitian lapangan, peneliti menemukan penyebabnya adalah kurangnya inisiatif dari pihak BPD dalam melakukan Kegiatan-Kegiatan rutin yang dapat menampung aspirasi masyarakat yang kemudian dapat disalurkan kepada pihak atau instansi yang berwenang.

Tabel 5.20 Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Baik	7	6,03 %
	Kurang Baik	1	0,86 %
	Tidak Baik	1	0,86 %
Jumlah		9	7,75 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel jawaban BPD di atas dapat kita lihat dari 9 orang Anggota BPD, 7 orang (6,03 %) mengatakan Baik, 1 orang mengatakan Kurang Baik dan 1 orang (0,86%) mengatakan Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat masih dalam kategori tidak baik.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Baik	-	-
	Kurang Baik	8	6,89 %
	Tidak Baik	2	1,72 %
Jumlah		10	8,61 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel jawaban Aparat Desa di atas dapat kita lihat dari 10 orang aparat Desa, 8 orang (6,89 %) mengatakan Kurang Baik dan 2 orang (1,72 %) mengatakan Tidak Baik.

mengatakan Fungsi BPD dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat masih dalam kategori tidak baik.

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Baik	3	2,58 %
	Kurang Baik	56	48,27 %
	Tidak Baik	38	32,75 %
Jumlah		97	83,6 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Masyarakat di atas dapat kita lihat dari 97 orang Masyarakat, 3 orang (2,58 %) mengatakan Baik, 56 orang (48,27 %) mengatakan Kurang Baik dan 38 orang (32,75 %) mengatakan Kinerja BPD dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat masih dalam kategori tidak baik.

Dari ketiga tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 116 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa pelaksanaan fungsi BPD masih dalam kategori Kurang Baik yaitu Sebanyak 65 orang atau 56,03% responden yang mengatakan demikian dengan klasifikasi dari BPD sebanyak 1 orang (0,86%), aparat desa sebanyak 8 orang (6,89%) serta masyarakat sebanyak 56 orang (48,27%). Hal ini terjadi Karena kurangnya koordinasi dan Komunikasi antara BPD dengan Aparat Desa serta Masyarakat, sehingga BPD belum dapat menjalankan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dengan maksimal.

Tabel 5.21 Tanggapan Responden Mengenai Proses Kinerja BPD Ketika Turun Langsung ke Lapangan Untuk Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Baik	6	5,17 %
	Kurang Baik	3	2,58 %
	Tidak Baik	-	-
Jumlah		9	7,75 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel jawaban BPD di atas dapat kita lihat dari 9 orang Anggota BPD, 6 orang (5,17 %) mengatakan Baik dan 3 orang (2,58 %) mengatakan Kurang Baik Mengenai Proses Kinerja BPD Ketika Turun Langsung ke Lapangan Untuk Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Baik	4	3,44 %
	Kurang Baik	2	1,72 %
	Tidak Baik	4	3,44 %
Jumlah		10	8,61 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel jawaban Aparat Desa di atas dapat kita lihat dari 10 orang aparat Desa, 4 orang (3,44 %) mengatakan Baik, 2 orang (1,72 %) mengatakan Kurang Baik dan 4 orang (3,44 %) mengatakan tidak baik Mengenai Proses Kinerja BPD Ketika Turun Langsung ke Lapangan Untuk Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Baik	2	1,72 %
	Kurang Baik	73	62,93 %
	Tidak Baik	22	18,96 %
Jumlah		97	83,6 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel jawaban Masyarakat di atas dapat kita lihat dari 97 orang Masyarakat, 2 orang (1,72 %) mengatakan Baik, 73 orang (62,93%) mengatakan Kurang Baik dan 22 orang (18,96 %) mengatakan tidak baik Mengenai Proses Kinerja BPD Ketika Turun Langsung ke Lapangan Untuk Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

Dari ketiga tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 116 responden, mayoritas dari mereka mengatakan Proses Kinerja BPD ketika turun langsung ke lapangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih dalam kategori Kurang Baik yaitu Sebanyak 78 orang atau 67,24 % responden yang mengatakan demikian dengan klasifikasi dari BPD sebanyak 3 orang (2,58%), Aparat Desa sebanyak 2 orang (1,72%) dan masyarakat sebanyak 73 orang (62,93%), alasannya karena kegiatan ke lapangan untuk menampung aspirasi masyarakat oleh BPD hanya dilakukan sangat jarang hal ini yang kemudian menyebabkan masyarakat menilai kinerja BPD kurang baik.

Tabel 5.22 Tanggapan Responden Tentang Tempat Menyalurkan Aspirasi dari Masyarakat

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Tahu	9	7,75 %
	Belum Tahu	-	-
	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		9	7,75 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel jawaban BPD di atas diketahui bahwa keseluruhan anggota BPD yaitu 9 orang (7,75%) mengatakan tahu tentang tempat menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Tahu	8	6,89 %
	Belum Tahu	2	1,72 %
	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		10	8,61 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dari 10 orang aparat Desa, 8 orang (6,89%) menjawab Tahu dan 2 orang (1,72%) menjawab belum tahu di mana tempat menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Tahu	15	12,93 %
	Belum Tahu	62	53,44 %
	Tidak Tahu	20	17,24 %
Jumlah		97	83,6 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dari 97 orang masyarakat, 15 orang (12,93%) menjawab tahu, 62 orang (53,44%) menjawab belum tahu dan 20 orang (17,24%) menjawab tidak tahu mengenai tempat menyalurkan aspirasi.

Berdasarkan tiga tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 116 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa mereka belum mengetahui tempat untuk menyalurkan aspirasi mereka yaitu sebanyak 64 orang atau 55,17 % dengan klasifikasi dari BPD tidak ada yang menjawab belum tahu, Aparat Desa sebanyak 2 orang (1,72%) dan masyarakat sebanyak 62 orang (53,44%), dengan alasan karena kurangnya komunikasi serta sosialisasi BPD dan Aparat Desa dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tempat untuk menyalurkan aspirasi mereka.

Tabel 5.23 Tanggapan Responden Tentang Aspirasi Yang Dijadikan Perdes Sesuai Dengan Keinginan Masyarakat

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Sudah	7	6,03 %
	Sedikit	1	0,86 %
	Tidak Pernah	1	0,86 %
Jumlah		9	7,75 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dari 9 orang anggota BPD, 7 orang (6,03%) mengatakan sudah, 1 orang (0,86%) mengatakan sedikit dan 1 orang (0,86%) mengatakan tidak pernah ada aspirasi yang dijadikan perdes sesuai dengan keinginan masyarakat.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Sudah	6	5,17 %
	Sedikit	2	1,72 %
	Tidak Pernah	2	1,72 %
Jumlah		10	8,61 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dari 10 orang Aparat Desa, 6 orang (5,17 %) mengatakan sudah, 2 orang (1,72 %) mengatakan sedikit dan 2 orang (1,72 %) mengatakan tidak pernah ada aspirasi yang dijadikan perdes sesuai dengan keinginan masyarakat.

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Sudah	4	3,44 %
	Sedikit	70	60,34 %
	Tidak Pernah	23	19,82 %
Jumlah		97	83.6 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dari 97 orang Masyarakat, 4 orang (3,44 %) mengatakan sudah, 70 orang (60,34 %) mengatakan sedikit dan 23 orang (19,82 %) mengatakan tidak pernah ada aspirasi yang dijadikan perdes sesuai dengan keinginan masyarakat.

Berdasarkan tiga tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 116 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa hanya sedikit aspirasi masyarakat yang dijadikan Perdes oleh Badan Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan Keinginan Masyarakat yaitu sebanyak 73 orang atau 62,93 % responden yang mengatakan demikian dengan klasifikasi dari BPD sebanyak 1 orang (0,86%), Aparat Desa sebanyak 2 orang (1,72%) dan masyarakat sebanyak

70 orang (60,34%) . Dari hasil penelitian lapangan hal ini disebabkan karena Setiap pelaksanaan Rapat dan Pertemuan yang dilakukan oleh BPD beserta Aparat Desa, Hanya sebagian kecil dari masyarakat dan pihak Aparat Desa yang hadir dalam rapat tersebut sehingga hanya Aspirasi dari Mereka sajalah yang dapat di Jadikan Perdes, sedangkan masih banyak masyarakat lainnya yang tidak mengikuti kegiatan rapat yang ingin menyalurkan aspirasinya. Sekali lagi hal ini disebabkan kurangnya informasi dan Komunikasi dari pihak-pihak yang terkait.

Tabel 5.24 Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi Dalam Memberikan Masukan Atau Aspirasi Kepada BPD

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Selalu	8	6,89 %
	Kadang-Kadang	1	0,86 %
	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		9	7,75 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa dari 9 orang anggota BPD, 8 orang (6,89 %) mengatakan selalu dan 1 orang (0,86 %) mengatakan Kadang-kadang mengenai partisipasi dalam memberikan masukan atau aspirasi kepada BPD.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Selalu	7	6,03 %
	Kadang-Kadang	3	2,58 %
	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		10	8,61 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa dari 10 orang aparat Desa, 7 orang (6,03%) mengatakan selalu dan 3 orang (2,58 %) mengatakan Kadang-

kadang mengenai partisipasi dalam memberikan masukan atau aspirasi kepada BPD.

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Selalu	1	0,86 %
	Kadang-Kadang	79	68,10 %
	Tidak Pernah	17	14,65 %
Jumlah		97	83,6 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 97 orang masyarakat, 1 orang (0,86 %) mengatakan selalu, 79 orang (68,10 %) mengatakan Kadang-kadang dan 17 orang (14,65 %) mengatakan tidak pernah mengenai partisipasi dalam memberikan masukan atau aspirasi kepada BPD.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 116 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa partisipasi mereka dalam memberikan masukan atau aspirasi kepada BPD masih dalam kategori Kadang-Kadang yaitu sebanyak 83 orang atau 71,55% dengan klasifikasi dari BPD sebanyak 1 orang (0,86%), Aparat Desa sebanyak 3 orang (2,58%) dan masyarakat sebanyak 79 orang (68,10%), Alasannya yaitu sering tidak hadirnya mereka dalam setiap kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh BPD karena kesibukan masing-masing sehingga mereka juga jarang memberikan masukan atau aspirasi kepada BPD.

Tabel 5.25 Tanggapan Responden Mengenai Penyaluran Aspirasi Masyarakat Oleh BPD Sesuai Dengan Keinginan Masyarakat

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Sudah	5	4,31 %
	Sedikit	2	1,72 %
	Tidak Pernah	2	1,72 %
Jumlah		9	7,75 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa dari 9 orang anggota BPD, 5 orang (4,31%) mengatakan Sudah, 2 orang (1,72%) mengatakan sedikit dan 2 orang (1,72%) mengatakan tidak pernah mengenai Penyaluran Aspirasi Masyarakat Oleh BPD Sesuai Dengan Keinginan Masyarakat.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Aparat Desa	Sudah	6	5,17 %
	Sedikit	1	0,86 %
	Tidak Pernah	3	2,58 %
Jumlah		10	8,61 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa dari 10 orang Aparat Desa, 6 orang (5,17 %) mengatakan Sudah, 1 orang (0,86 %) mengatakan sedikit dan 3 orang (2,58%) mengatakan tidak pernah mengenai Penyaluran Aspirasi Masyarakat Oleh BPD Sesuai Dengan Keinginan Masyarakat.

3. Jawaban Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Masyarakat	Sudah	5	4,31 %
	Sedikit	58	50 %
	Tidak Pernah	34	29,31 %
Jumlah		97	83,6 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa dari 97 orang Masyarakat, 5 orang (4,31 %) mengatakan Sudah, 58 orang (50%) mengatakan sedikit dan 34 orang (29,31 %) mengatakan tidak pernah mengenai Penyaluran Aspirasi Masyarakat Oleh BPD Sesuai Dengan Keinginan Masyarakat.

Dari ketiga tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 116 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa hanya sedikit aspirasi masyarakat yang disalurkan oleh Badan Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan Keinginan Masyarakat yaitu sebanyak 61 orang atau 52,58% responden yang mengatakan demikian dengan klasifikasi dari BPD sebanyak 2 orang (1,72%), Aparat Desa sebanyak 1 orang (0,86%) dan masyarakat sebanyak 58 orang (50%). Dari hasil penelitian lapangan, diketahui bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena kurangnya informasi dan komunikasi baik dari pihak BPD, Aparat Desa Maupun Masyarakat dalam setiap kegiatan rapat, sehingga banyak masyarakat yang belum dapat menyalurkan aspirasinya sehingga aspirasi yang salurkan oleh BPD belum sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.

Tabel 5.26 Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

No	Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		A	B	C	
1	Pernah atau tidaknya BPD menyalurkan Aspirasi Masyarakat	28	74	14	116
2	BPD yang turun langsung kelapangan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat	15	70	31	116
3	Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kepada Instansi Yang Berwenang	16	60	40	116
4	Kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat	9	68	39	116
5	Pelaksanaan Fungsi BPD dalam menampung aspirasi Masyarakat	10	65	41	116
6	Proses Kinerja BPD Ketika Turun Langsung Kelapangan	12	78	26	116
7	Tempat Menyalurkan Aspirasi dari masyarakat	32	64	20	116
8	Aspirasi yang dijadikan Perdes Sesuai dengan Keinginan Masyarakat	14	73	26	116
9	Partisipasi dalam memberikan masukan atau aspirasi kepada BPD	16	83	17	116
10	Penyaluran Aspirasi Masyarakat Oleh BPD sesuai dengan keinginan Masyarakat	16	61	39	116
Jumlah Rata-Rata		17	70	29	116
Persentase		14,65%	60,34 %	25%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2011

Berdasarkan tabel rekapitulasi tentang tanggapan responden dari indikator fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kurang Berjalan Dengan Baik, dengan alasan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Hanya Sebagian Kecil yang turun kelapangan, selain itu kurangnya pendekatan dan kurangnya komunikasi antara BPD, Aparat Desa dan Masyarakat

juga menjadi salah satu faktor penyebab kurang berjalannya fungsi BPD Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ini.

Selain itu kurangnya partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat akan keterlibatan mereka dalam semua keputusan maupun penetapan peraturan yang dilakukan oleh BPD juga menjadikan ini sebagai salah satu faktor kurang optimalnya BPD dalam menjalankan Fungsinya Sebagai Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat.

Tabel 5.27 Rekapitulasi Hasil Angket Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Variabel Penelitian	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Total
1	Merumuskan dan Menetapkan Peraturan	27 (23,27)	59 (50,86)	30 (25,86)	116
2	Menampung dan Menyalurkan Aspirasi	17 (14,65)	70 (60,34)	29 (25)	116
Jumlah		44 (18,96)	129 (55,60)	59 (25,43)	232

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari Rekapitulasi angket pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi di atas dapat dilihat bahwa:

1. Dari Fungsi Merumuskan dan menetapkan peraturan Desa, diketahui bahwa pelaksanaan fungsi tersebut belum terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan tanggapan responden yang mengatakan kurang baik yaitu sebanyak 59 orang atau 50,86%, adapun alasan responden mengenai kurang baiknya kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi merumuskan dan menetapkan peraturan desa adalah karena kurangnya komunikasi antara pihak BPD, Aparat Desa serta Masyarakat, yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh BPD. Dengan demikian Fungsi

BPD dalam merumuskan dan menetapkan peraturan Desa belum dapat terlaksana dengan maksimal.

2. Dari fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa fungsi tersebut juga belum terlaksana dengan baik, hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah responden yang memilih jawaban pada Angket penelitian dengan kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 70 orang atau 60,34% responden, dengan alasan hanya sebagian kecil anggota BPD yang turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat, sedangkan untuk penyaluran aspirasi yang telah ditampungpun masih dalam kategori Kurang Baik karena belum ada Peraturan dan kebijakan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang tegah dihadapi oleh masyarakat.

Jadi akumulasi tanggapan responden mengenai pelaksanaan kedua fungsi BPD sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu yang mengatakan baik sebanyak 44 atau 18,96%, kemudian yang menjawab kurang baik sebanyak 129 atau 55,60% dan yang menjawab Tidak Baik yaitu Sebanyak 59 atau 25,43%. Kesimpulannya, dari kedua fungsi BPD yaitu Merumuskan dan menerapkan Peraturan Desa serta Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Masih Belum Berjalan Sebagaimana Mestinya atau masih dalam kategori *Kurang Baik*.

5.3 Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Dari Hasil Penelitian yang peneliti lakukan di lapangan terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam BPD itu sendiri diantaranya :
 - a. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Daerah Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permasyarakatan Desa.
 - b. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi antara Ketua BPD dengan Aanggotanya serta Aparat Desa dengan Masyarakat dimana hal ini disebabkan oleh kesibukan mereka masing-masing.
 - c. Kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Daerah Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permasyarakatan Desa.
2. Faktor Ekstern, yaitu berasal dari luar BPD yang meliputi:
 - a. Kurangnya Partisipasi Masyarakat di Desa Jaya Kopah terhadap kegiatan-kegiatan BPD, hal ini terlihat dari kurang antusiasnya

masyarakat untuk hadir dalam menyampaikan ide-ide maupun aspirasi dalam kegiatan rapat BPD.

- b. Adanya kesalahan anggapan ditengah-tengah masyarakat bahwa hanya Ketua dan Anggota BPD lah yang memiliki wewenang dalam mencetuskan ide-ide atau gagasan dalam upaya menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga mereka tidak mau peduli dan berpartisipasi dengan setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPD.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahsan diatas maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu Meliputi Fungsi Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan Fungsi Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - a. Fungsi BPD dalam Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa masih dikategorikan belum berfungsi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden terbanyak yaitu sebanyak 59 orang atau 50,86% responden yang mengatakan demikian pada tabel 5.15. Hal ini disebabkan kurang terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara BPD dengan Aparat Desa Jaya Kopah serta Masyarakat yang disebabkan oleh kesibukan mereka masing-masing sehingga dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa hanya melibatkan sebagian Anggota BPD, aparat Desa Serta Sebagian masyarakat saja. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana yang

mendukung sehingga dalam melaksanakan kegiatan rapat dilaksanakan pada tempat yang tidak tetap.

b. Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga kurang berfungsi dan belum berjalan dengan optimal sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terbanyak yaitu 70 orang atau 60,34 % pada tabel 5.26 yang mengatakan demikian karena anggota BPD hanya sebagian kecil yang langsung kelapangan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat sehingga anggota BPD belum dapat melaksanakan fungsi keduanya ini dengan optimal. Selain kurangnya komunikasi serta koordinasi antara ketiga unsur yaitu BPD, Aparat Desa Dan Masyarakat ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat belum dapat berjalan dengan maksimal. Selanjutnya kesadaran dan partisipasi masyarakat juga dinilai kurang demi terlaksananya tugas dan Fungsi BPD dengan maksimal.

Adapun yang menjadi penyebab mengapa pelaksanaan fungsi BPD belum Optimal, yaitu:

1. Kurangnya Sarana Dan Prasarana yang menunjang Kinerja BPD dalam melaksanakan Fungsinya, Seperti Gedung Rapat yang tetap, Komputer, Meja, Kursi dan lain sebagainya.

2. Kurangnya Kesadaran dan Tanggung Jawab dari Setiap Anggota BPD untuk selalu ikut serta atau menghadiri rapat yang diadakan oleh BPD.
3. Kurangnya Kesadaran dan Tanggung Jawab dari Aparat Desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan rapat yang dilakukan oleh BPD.
4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat untuk menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh BPD.
5. Kurangnya Komunikasi antara pihak BPD, Aparat Desa Serta Masyarakat yang menyebabkan minimnya penyebaran informasi mengenai tempat serta jadwal kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh BPD.
6. Kesibukan dari masing-masing pihak yang menyebabkan ketidak hadiran mereka dalam rapat yang dilaksanakan oleh BPD.

6.2 Saran

Adapun yang menjadi saran penelti kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah:

1. Perlu adanya pembinaan Sumber Daya Manusia dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jaya Kopah, sehingga setiap anggota memiliki kapabilitas dan skill dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga setiap aspirasi dan penerapan peraturan dari BPD Dapat diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
2. Perlu adanya pembinaan komunikasi dan koordinasi antara BPD, Aparat Desa dan Masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPD mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat. Dengan

demikian, semua aspirasi dari masyarakat dapat ditampung dan kemudian dapat disalurkan kepada instansi yang berwenang.

3. Agar pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan dengan baik maka harus didukung dengan dana, sarana dan prasarana yang memadai, maka diharapkan Pemerintah Desa dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana demi menunjang kegiatan BPD.

Selain itu dapat juga mengajukan bantuan kepada pemerintah terkait yang mencakup tentang penyediaan sarana dan prasarana yang masih kurang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert, *Otonomi Daerah*, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta. 2002
- Budihardjo, Miriam dan Ibrahim Ambong. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesi*. Rajawali Press. Jakarta. 1993
- Dwipayana, AAGN Ari dkk. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta. 2003
- Kencana Inu, Sistem Pemerintahan Di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2002
- Kartohadikoesoemo,soetardjo. *Desa*. Balai Pustaka. Jakarta. 1984
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT.Grafindo Persada. 2007
- Nazir, muhammmad. *Metode Penelitian. Ghalia Indonesia*. Jakarta. 1999
- Ndraha, Talizidruhu. *Konsep Administrasi dan Admnistrasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1989.
- Rasyid,Ryas dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2003.
- Ruman Sumadilaga. *Peradaban Sosiologi Pedesaan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2007
- Santosa Budi. *Desa dan Pemerintahannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2003
- Saragi, Tumpal P. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*.Yogyakarta : IRE Press. 2004.
- Sumardjan Selo. *Perkembangan Kehidupan Pedesaan*. Jakarta: PT.Grafindo Persada. 2004

Setyawan, Dharma. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Djambatan. 2002.

Sutoro Eko dkk. *Pembaharuan Pemerintahan Desa*. IRE Press. Yogyakarta. 2003.

The Liang Gie. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Liberti, Yogyakarta. 1982

Widjaja Haw. *Pemerintahan Desa Marga*. Grafindo Persada, Jakarta. 2002

Yuliani,Sri. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. UNS Press. Surakarta. 2004

Sumber Non Buku

Undang-undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Kedudukan, Fungsi Dan Wewenang BPD

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 Tahun 2009 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah